

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah dijelaskan selanjutnya akan membahas terkait tinjauan pada penelitian sebelumnya yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini. Pemaparannya akan diawali kaitan antara fokus penelitian terhadap administrasi serta diakhiri kerangka pemikiran penulis yang nantinya akan terbentuk atas teori yang dibahas.

#### 2.1. Peneliti Terdahulu

Dalam sub bab ini peneliti melakukan pemaparan tinjauan peneliti di salah satu penelitian dan konsep yang mempunyai kaitan terhadap penelitian ini. Harus dijelaskan jika hasil penelitian terdahulu dipakai untuk dikaji serta ditelaah secara seksama. Penelitian tersebut yaitu:

Penelitian pertama, jurnal karya Bagit, Regina Sari, Sambiran, Sarah, Kairupan, Josef (2017), yang berjudul “Evaluasi Program Kerja Dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Pasir Putih Maelang (Dinas Pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Bolaang Mongondow).”<sup>1</sup>

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif atau penelitian yang memberi gambaran atau penjelasan terkait permasalahan yang akan dihadapi. Pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan salah satu fenomena sosial/alam

---

<sup>1</sup>Bagit, Regina Sari, Sambiran, Sarah, Kairupan, Josef, “Evaluasi Program Kerja Dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Pasir Putih Maelang (Dinas Pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Bolaang Mongondow)”, Vol. 1 No. 1, Jurnal Eksekutif (2017). Diakses pada tanggal 23 Maret 2023.

secara sistematis, faktual, serta akurat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk melihat bagaimana keberhasilan program yang dilaksanakan.

Hasil dari penelitian menunjukkan tidak terlaksana program yang sudah dirancang oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow, hal mampu kita lihat dalam hak kepemilikan yang sudah dibuat pembebasan lahan pemerintah desa pemerintahan Daerah, sarana pendukung yang menjadi faktor utama dalam pengelolaan obyek wisata alam dalam kabupaten antara lain penataan ulang pelataran parkir untuk pengunjung/wisatawan.

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada lokus dan juga program kerja, peneliti terdahulu menjelaskan tentang bahwa kurangnya sarana pendukung pada obyek wisata, sedangkan peneliti menjelaskan tentang pembangunan nasional berupa mengurangi angka kemiskinan dengan mensejahterakan warga lansia di Jakarta Barat.

Penelitian kedua, jurnal karya Nur Wahidah Kasim, Basir Palu, Reza Aril Ahri (2018), dengan judul “Evaluasi Program Layanan Home Care di Wilayah Kerja Puskesmas Batua Kota Makasar”, Universitas Muslim Indonesia<sup>2</sup>.

Metode yang digunakan pada penelitian yaitu penelitian kualitatif analisis deskriptif, hal ini untuk melakukan eksplorasi fenomena terkait evaluasi pelaksanaan program *Home Care* pada Puskesmas Batua Makasar memakai

---

<sup>2</sup>Nur Wahidah Kasim, Basir Palu, Reza Aril Ahri. “Evaluasi Program Layanan Home Care di Wilayah Kerja Puskesmas Batua Kota Makasar”. Vol. 1 No. 3. Jurnal Kesehatan WOH (2018). Diakses tanggal 23 Maret 2023.

metode wawancara serta observasi. Penelitian ini memiliki tujuan menjelaskan analisis pengaruh kualitas pelayanan *Home Care* di Puskesmas Batua Makasar Tahun 2018.

Hasil penelitian ini yaitu evaluasi dalam tahap input, meliputi 5M yaitu, *Man, Machine, Method, Money, Materials* telah terlaksana dengan baik, hanya saja kurangnya koordinasi yang tepat pada tahap pelaksanaan serta keterampilan perawat untuk mempengaruhi kemandirian pasien yang kurang.

Perbedaan pada penelitian terdahulu yaitu bahwa peneliti terdahulu menjelaskan bahwa evaluasi terletak pada pelaksanaan manajemen kinerja di instansi tersebut. Sedangkan penulis meneliti tentang terlaksana atau tidaknya program yang telah direncanakan.

Penelitian ketiga, jurnal karya Muhammad Dedi Widodo, Leon Candra, Elfia Elmasefira (2020), yang berjudul “Evaluasi Program Posyanadu Lansia Di Wilayah Kerja Puskesmas Harapan Raya Pekanbaru”<sup>3</sup>.

Penelitian ini memakai metode kualitatif analisis deskriptif, memberikan suatu gambaran ataupun memberikan penjelasan terkait permasalahan yang ada, hal ini memiliki tujuan menciptakan definisi atas suatu fenomena sosial/alam secara sistematis, faktual, dan akurat. Tujuan penelitian agar mengetahui evaluasi program posyanadu lansia.

---

<sup>3</sup>Muhammad Dedi Widodo, Leon Candra, Elfia Elmasefira. “Evaluasi Program Posyanadu Lansia Di Wilayah Kerja Puskesmas Harapan Raya Pekanbaru”. Vol. 4 No. 1. Jurnal Kesehatan Masyarakat (2020). Diakses tanggal 23 Maret 2023.

Hasil dari penelitian ini menyatakan ketersediaan sumber daya manusia yang masih tercukupi, tetapi pembiayaan posyandu lansia belum mencukupi, begitu juga dengan ketersediaan sarana serta prasarana belum cukup. Puskesmas diberikan saran agar melaksanakan pembinaan serta keterampilan untuk seluruh kader, meningkatkan kerjasama bersama tokoh masyarakat agar memperoleh dukungan materil, sarana dan prasarana, mengikuti serta melakukan penyesuaian kebijakan yang telah ditentukan.

Perbedaan dengan peneliti terdahulu terletak pada permasalahan yang diambil, peneliti terdahulu meneliti tentang evaluasi pada manajemen kinerja di instansi tersebut. Sedangkan penulis meneliti tentang gambaran pelaksanaan program yang sedang berjalan.

Peneliti keempat, jurnal internasional dari Robert Picciotto (2005), yang berjudul *“The Evaluation of Policy Coherence for Development”* (Evaluasi Kohersi Kebijakan untuk Pembangunan)<sup>4</sup>.

Metode yang digunakan pada penelitian yaitu penelitian kualitatif analisis deskriptif, hal ini untuk melakukan eksplorasi terhadap fenomena mengenai evaluasi pelaksanaan program kesejahteraan masyarakat pada perekonomian internasional. Penelitian ini memiliki tujuan untuk Promosi kesejahteraan manusia di zona kekacauan dan transisi tidak lagi dapat dievaluasi hanya dengan memeriksa sejauh mana program dan proyek bantuan mencapai tujuan yang relevan secara efisien.

---

<sup>4</sup>Robert Picciotto, *“The Evaluation of Policy Coherence for Development”*. Vol. 11 No. 3. Jurnal SAGE (2005). Diakses tanggal 1 April 2023.

Hasil dari penelitian ini adalah evaluasi yang dirancang untuk memperhitungkan pengaruh pembangunan dari kebijakan dampak pembangunan dari kebijakan negara – negara kaya dan untuk mendorong sinergi yang lebih besar diantara kebijakan negara-negara kaya dalam mendukung kemiskinan global pengurangan.

Perbedaan penelitian ini adalah peneliti menjelaskan tentang kesejahteraan masyarakat dalam perekonomian internasional, walaupun sama-sama membahas tentang aspek ekonomi namun beda lokus yang diambil. Sedangkan penulis meneliti tentang kesejahteraan warga lansia dalam pembangunan nasional.

Penelitian kelima, jurnal internasional karya Lorraine Murphy (2012). Dengan judul “*A qualitative evaluation of policy instruments used to improve energy performance of existing private dwellings in the Netherlands*” (Evaluasi kualitatif instrumen kebijakan yang digunakan untuk meningkatkan kinerja energi tempat tinggal pribadi yang ada di Belanda)<sup>5</sup>.

Penelitian ini memakai metode kualitatif analisis deskriptif, memberikan gambaran ataupun penjelasan yang tepat terkait permasalahan yang ada, hal tersebut memiliki tujuan agar tercipta deskripsi atas suatu fenomena sosial/alam secara sistematis, faktual, dan akurat. Penelitian ini memiliki tujuan agar memperoleh penghematan energi yang dipimpin oleh pelaksana kebijakan.

---

<sup>5</sup>Lorraine Murphy, “*A qualitative evaluation of policy instruments used to improve energy performance of existing private dwellings in the Netherlands*”. Vol. 45. Jurnal ScienceDirect (2012). Diakses tanggal 3 April 2023.

Hasil dari penelitian ini yaitu sarana dan prasarana saat ini tidak dilengkapi dengan baik untuk menempa strategi penghematan energi jangka panjang untuk tempat tinggal yang ada. Lebih lanjut ditunjukkan bahwa kompleksitas dengan tempat tinggal yang ada tidak hanya terbatas pada hambatan yang sering disebutkan tetapi juga pada kerumitan merancang dan mengoperasikan campuran instrumen yang diatur dengan baik.

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu peneliti meneliti tentang kebijakan dalam penghematan energi pada perubahan iklim yang mempengaruhi ekonomi di negara Belanda. Sedangkan penulis meneliti tentang aspek ekonomi dalam mendukung pembangunan nasional di Indonesia.

**Tabel 2.1**  
**Peneliti Terdahulu**

<b>NO</b>	<b>Nama Peneliti/Tahun Peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
<b>1.</b>	Bagit, Regina Sari, Sambiran, Sarah, Kairupan, Josef (2017)	Evaluasi Program Kerja Dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Pasir Putih Maelang (Dinas Pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Bolaang Mongondow)	Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Terletak pada locus yang diambil oleh masing-masing peneliti, pada jurnal locus di Dinas Pariwisata dan kebudayaan. Sedangkan penulis locus berada di Suku Dinas Sosial Jakarta Barat.
<b>2.</b>	Nur Wahidah Kasim, Basir Palu, Reza Aril Ahri (2018)	Evaluasi Program Layanan Home Care di Wilayah Kerja Puskesmas Batua Kota Makasar.	Metode penelitian kualitatif analisis deskriptif	Peneliti terdahulu meneliti tentang program kerja dibidang kesehatan. Sedangkan peneliti meneliti tentang

				program kerja dalam menyongsong ekonomi.
3.	Muhammad Dedi Widodo, Leon Candra, Elfia Elmasefira (2020)	Evaluasi Program Posyanadu Lansia Di Wilayah Kerja Puskesmas Harapan Raya Pekan Baru	Menggunakan metode kualitatif analisis deskriptif	Perbedaannya yaitu terletak pada bagian objek, yaitu peneliti terdahulu meneliti Posyandu Lansia sedangkan penulis mmeneliti tentang Kartu Lansia Jakarta.
4.	Robert Picciotto (2005)	<i>The Evaluation of Policy Coherence for Development</i> (Evaluasi Kohersi Kebijakan untuk Pembangunan)	Menggunakan metode kualitatif analisis deskriptif	Peneliti terdahulu meneliti tentang kesejahteraan masyarakat dalam mengatur perekonomian internasional. Sedangkan penulis meneliti tentang kesejahteraan warga lansia dalam mengurangi angka kemiskinan nasional.
5.	Lorraine Murphy (2012)	<i>A qualitative evaluation of policy instruments used to improve energy performance of existing private dwellings in the Netherlands</i> (Evaluasi kualitatif instrumen kebijakan yang digunakan untuk meningkatkan kinerja energi tempat tinggal pribadi yang ada di	Menggunakan metode kualitatif analisis deskriptif	Peneliti terdahulu meneliti kebijakan perubahan iklim yang berdampak pada ekonomi di Negara Belanda. Sedangkan penulis meneliti program pembangunan nasional dalam mensejahterakan warga lansia di Jakarta Barat.

		Belanda)		
--	--	----------	--	--

## 2.2. Kerangka Teori

### 2.2.1. Kebijakan

#### 2.2.1.1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan a Taufiqrahman. DR 2014, "*Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selku Penyelenggara Pemerintahan*". Diakses pada 25 Maret 2023. tau biasa dikenal dengan istilah policy dapat diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjado garis besar dan dasr rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak, pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Menurut Carl J. Federick oleh Leo Agustino, menyatakan bahwa kebijakan merupakan sebuah rangkaian aktivitas yang dilaksanakan kelompok atau pemerintah yang terdapat berbagai kesulitan serta suatu kesempatan untuk mencapai sebuah tujuan.<sup>6</sup>

Menurut James E. Anderson yang dikutip oleh Islammy, menyatakan bahwa sebuah kebijakan merupakan sebuah tindakan yang memiliki tujuan untuk

---

<sup>6</sup> Taufiqrahman. DR 2014, "*Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selku Penyelenggara Pemerintahan*". Diakses pada 25 Maret 2023.



diikuti dan dilakukan oleh seorang pelaksana yang berguna untuk mencari solusi terhadap suatu permasalahan.<sup>7</sup>

Selanjutnya yaitu lingkup kebijakan publik yang memiliki cakupan sangat luas dalam berbagai bidang contohnya sektor ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Jika kita melihat pada hirarki kebijakan publik yang memiliki sifat nasional, regional, serta lokal contohnya undang-undang, peraturan, pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota serta keputusan bupati atau walikota.

Menurut Laswell dan Kaplan menyatakan, bahwa kebijakan publik merupakan sebuah proyek program seperti tujuan, nilai, dan praktik agar bisa berjalan secara terarah. Menurut Tangkilisan menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan sejumlah kegiatan pemerintah dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada dimasyarakat secara langsung atau melalui berbagai lembaga yang terkait.<sup>8</sup>

Bisa disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan sebuah rangkaian keputusan kebijaksanaan yang diambil oleh pemangku kebijakan dalam mewujudkan tujuan-tujuan tertentu didalam masyarakat.

---

<sup>7</sup> Taufiqrahman. DR 2014, "*Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*". Diakses pada 25 Maret 2023.

<sup>8</sup> Taufiqrahman. DR 2014, "*Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*". Diakses pada 25 Maret 2023

### 2.2.1.2. Arti Pentingnya Studi Kebijakan Publik

Adapun tiga manfaat kebijakan publik yaitu seperti mengembangkan ilmu pengetahuan, meningkatkan profesionalisme praktisi, dan tujuan politik melewati menjabaran berikut :

a. Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Para ilmuan menempatkan kebijakan publik sebagai *dependent variable* yang berfungsi untuk menentukan *independent variable*. Sehingga, nantinya bisa mencari variable-variabel yang bisa memberikan pengaruh terhadap isi dari sebuah kebijakan publik seperti melakukan identifikasi pada faktor-faktor yang bisa mempengaruhi penerbitan undang-undang anti terorisme di Indonesia.

Sedangkan pada studi kebijakan meletakkan kebijakan publik sebagai *independent variable*. Sehingga, berusaha untuk melakukan identifikasi mengenai apa dampak dari kebijakan public tersebut. Misalnya untuk menganalisis apa dampak dari kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak yang dilakukan oleh pemerintah.

b. Meningkatkan Profesionalisme Praktisi

Membantu para praktisi dalam menyelesaikan berbagai masalah-masalah publik. Sehingga, nantinya juga akan mempelajari kebijakan publik yang berguna untuk mengetahui dasar teoritis mengenai bagaimana pembuatan kebijakan publik yang baik dan meminimalisir dampak buruk pada kebijakan publik yang nantinya dibentuk. Nantinya dimasa depan

bisa membentuk kebijakan public yang berkualitas dan bisa menompang tujuan dari pembangunan.

c. Berguna untuk tujuan politik

Kebijakan publik yang dibentuk akan melewati proses yang benar dan didukung oleh teori yang kuat serta mempunyai posisi yang kuat juga terhadap kritikan dari berbagai lawan politik. Sedangkan kebijakan publik yang bisa memberikan keyakinan kepada lawan politiknya maka kebijakan publik tersebut nantinya sulit untuk dicabut. Hal ini bisa juga dipengaruhi oleh kepentingan sesaat pada lawan politiknya.

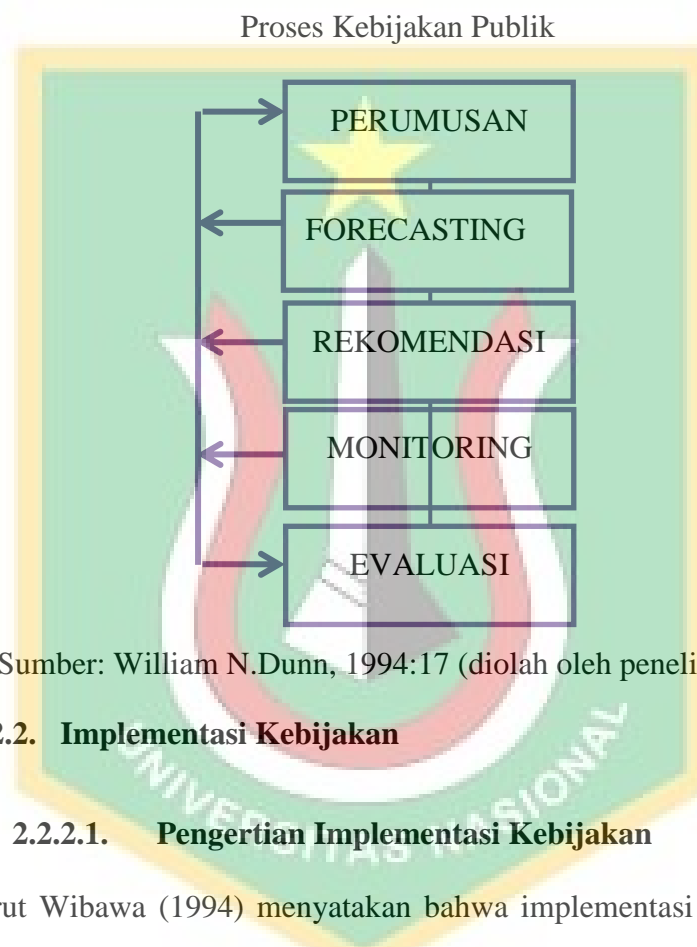
**2.2.1.3. Analisis Proses Kebijakan Publik**

Proses kebijakan publik yaitu suatu rangkaian kegiatan intelektual yang dilaksanakan dalam proses kegiatan yang memiliki sifat politis. Sehingga, ini berpengaruh dalam kegiatan penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.

Berikut ini tahapan-tahapan pada analisis kebijakan:

- 1) Perumusan Masalah : Memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah.
- 2) Forecasting (Peramalan) : Memberikan informasi mengenai konsekuensi dimasa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk apabila tidak membuat kebijakan.
- 3) Rekomendasi Kebijakan : Memberikan manfaat disetiap alternatif

- 4) Monitoring Kebijakan : konsekuensi selama diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendala
- 5) Evaluasi Kebijakan : Memberikan informasi mengenai kinerja



## 2.2.2. Implementasi Kebijakan

### 2.2.2.1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Wibawa (1994) menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah bentuk pertanggung jawaban atas keputusan yang diambil terkait kebijakan yang mendasar. Hal ini juga terdapat dalam undang-undang serta dalam bentuk instruksi-instruksi yang penting atau keputusan undang-undang. Keputusan

tersebut menjabarkan jika masalah yang hendak dicapai dan ada berbagai cara untuk “menggambarkan struktur” pada proses implementasi tersebut.<sup>9</sup>

Menurut Mufiz (1999) memberikan kesimpulan implementasi kebijakan publik tidak hanya membahas mengenai perilaku badan pengatur yang bertanggungjawab pada implementasi program tersebut dan pemenuhan kelompok sasaran. Namun, akan membahas mengenai kekuatan politik, ekonomi, dan sosial secara langsung atau pun tidak langsung. Nantinya juga bisa memberikan pengaruh terhadap perilaku semua pihak dan memiliki dampak positif yang sangat diharapkan.

Bisa disimpulkan jika implementasi kebijakan yaitu proses dalam menjalankan, penyelenggaraan, serta pengupayaan proses keputusan kebijakan serta alternatif yang sudah diputuskan. Sehingga, diharapkan mampu mendapatkan suatu hasil yang sesuai atas tujuan yang sudah dibentuk pada kebijakan tersebut. Tujuan implementasi kebijakan dapat menetapkan arah tujuan kebijakan yang dibentuk agar mampu diimplementasikan. Proses implementasinya dapat dimulai jika tujuan-tujuan kebijakan publik sudah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan agar mencapai tujuan tersebut.

#### **2.2.2.2. Proses Implementasi Kebijakan**

Dalam proses implementasi kebijakan juga mempunyai beberapa aspek yang nantinya akan memiliki kaitan dengan prosesnya seperti teori serta model

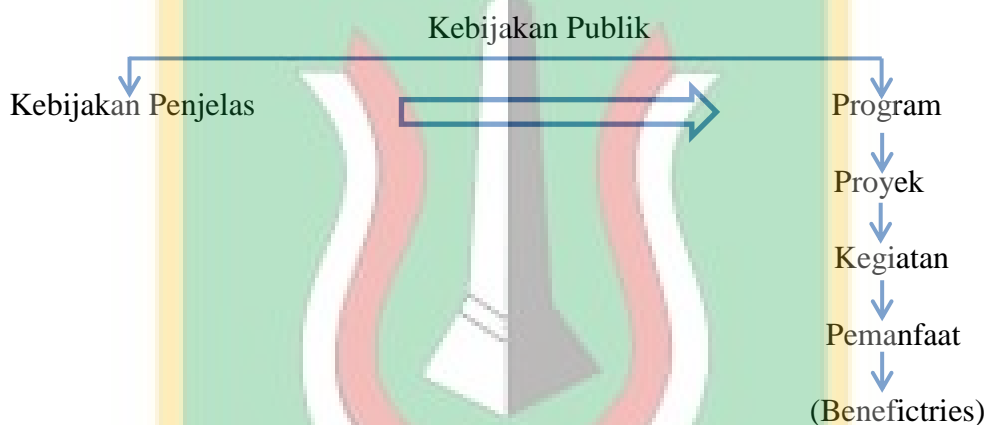
---

<sup>9</sup> Lisa Novita H 2022, “Implementasi Program Kartu Lansia Jakarta Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lansia oleh Dinas Sosial DKI Jakarta Tahun 2021”. *The Indonesian Journal Of Politics and Policy*. Vol. 4 No. 2. Diakses pada 26 Maret 2023.

implementasi kebijakan, pendekatan pada implementasi kebijakan, langkah-langkah implementasi, faktor-faktor pelaksanaan kebijakan, serta tantangan dan kendala pada keberhasilan implementasi kebijakan. Ketiga aspek ini nantinya dikemukakan pada pembahasan terkait strategi implementasi, kecukupan, dan kelengkapan implementasi kebijakan tersebut.

### 2.2.2.3. Strategi dan Langkah-langkah Implementasi Kebijakan

Adapun langkah-langkah implementasi, berikut tata urutan implementasi kebijakan.



Sumber: William N. Dunn, 2003 (diolah oleh penulis)

Tata Urutan Implementasi Kebijakan :

Tujuan kebijakan merupakan cara untuk melakukan intervensi. Sehingga, implementasi kebijakan juga bisa dikatakan sebagai tindakan dari intervensi itu sendiri. Implementasi kebijakan pada konteks manajemen yaitu berada pada kerangka *organizing-leading-controlling*. Dengan begitu, kebijakan sudah dibuat maka selanjutnya melakukan perorganisasian dan pelaksanaan kepemimpinan dalam memberikan arahan pelaksanaan dan pengendalian pada saat pelaksanaan kebijakan tersebut.

## 2.2.3. Evaluasi Program

### 2.2.3.1. Pengertian Evaluasi

Kata evaluasi menurut Arikunto, evaluasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu kegiatan. Dengan demikian, penelitian evaluasi program ini dilakukan untuk mengetahui tingkat efektifitas pelaksanaan program dengan cara mengukur hal-hal yang berkaitan dengan keterlaksanaan program tersebut.

Menurut kamus *Oxford Advance Learner's Dictionary Oof Current English*, evaluasi diartikan Upaya dalam menentukan nilai atau jumlah. Bisa menunjukkan bahwa kegiatan evaluasi harus dilakukan secara hati-hati, bertanggungjawab, menggunakan strategi, dan bisa dipertanggungjawabkan.

Menurut Anderson, evaluasi adalah sebuah proses dalam menentukan hasil yang sudah dicapai di beberapa kegiatan yang sudah direncanakan dalam mendukung tujuan yang akan dicapai. Pengertian lain, evaluasi bisa diartikan sebagai kegiatan untuk mencari suatu hal yang berharga dan didalamnya juga terdapat mencari informasi seperti menilai keberadaan suatu program, produksi, produser, serta alternatif strategi yang diajukan untuk mencaai tujuan yang ditentukan.

Menurut H.D. Sudjana, evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui apakah tujuan tersebut bisa dicapai, apakah sudah berjalan dengan rencana yang sudah dibuat dan akibat apa yang akan didapatkan pada kebijakan tersebut..

Evaluasi program merupakan sebuah proses yang berfungsi untuk menentukan apakah program tersebut bisa diimplementasikan atau tidak dengan cara mengetahui efektivitas yang ada di tiap komponen tersebut melalui informasi dari evaluator. Nanti ini bisa menentukan apakah hasil yang didapat dan hasil yang keluar bisa mendukung pelaksanaan program untuk bisa diimplementasikan.

Evaluasi yang dilakukan biasanya dilakukan dalam bentuk akuntabilitas para pelaksanaan dan penanggungjawab program tersebut. Sehingga bisa meningkatkan keyakinan pada tujuan program tersebut untuk bisa dicapai sesuai dengan visi dan misi yang sudah ditentukan oleh instansi tersebut. .

#### **2.2.3.2. Model Evaluasi Program**

Jika ingin melakukan evaluasi maka model yang nantinya akan dievaluasi harus diperhatikan terlebih dahulu. Model evaluasi merupakan model yang dibentuk oleh ahli evaluasi yang nantinya bisa menjadi dasar pada kepentingan yang diharapkan bagi seseorang atau instansi lainnya. Terdapat berbagai model evaluasi yang bisa digunakan namun tujuannya tetap sama yaitu mengumpulkan informasi mengenai objek yang akan dievaluasi.

Pada penelitian ini, penulis memakai model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) Evaluation Model yang dibentuk oleh Stufflebeam tahun 1966. Model ini adalah kerangka yang komperhensif agar memberikan arah pada pelaksanaan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif pada objek program, proyek, personalia, produk, institusi, dan sistem. Berikut ini beberapa jenis model evaluasi oleh Stufflebeam yaitu:



**a) Evaluasi Konteks**

Evaluasi Konteks berfungsi untuk melakukan identifikasi dan evaluasi kebutuhan yang menjadi dasar dalam menyusun program. Fokus utamanya yaitu melakukan identifikasi pada kekuatan dan kelemahan organisasi serta memberikan saran dalam meningkatkan kinerja. Tujuan utamanya yaitu untuk melakukan evaluasi kondisi pada keseluruhan organisasi, mengidentifikasi segala bentuk kelemahan, menginventarisasi kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kelemahan, mendiagnosis masalah yang dihadapi organisasi, dan mencari solusi yang tepat. Tujuan lainnya yaitu untuk mengevaluasi apakah tujuan dan prioritas yang sudah ditetapkan bisa memenuhi kebutuhan target organisasi.

**b) Evaluasi Masukan**

Evaluasi masukan berfungsi untuk melakukan identifikasi mengenai permasalahan, asset, dan peluang untuk membantu dalam mengambil keputusan pada saat akan menetapkan tujuan, prioritas, dan membantu kelompok pengguna secara lebih luas dalam pengevaluasian tujuan, prioritas, dan manfaat program, mengevaluasi pendekatan alternatif, rencana tindakan, rencana staf, dan anggaran untuk kelayakan dan potensi dalam memenuhi berbagai kebutuhan dan tujuan yang sudah ditetapkan.

Evaluasi input bertujuan untuk membantu dalam menentukan program dalam melakukan perubahan yang diperlukan. Sehingga, nantinya bisa mencari hambatan dan potensi sumber daya yang ada. Nantinya, juga

bisa membantu klien dalam melakukan evaluasi alternatif yang berkaitan dengan kebutuhan organisasi. Nantinya bisa meminimalisir inovasi-inovasi yang tidak berguna dan kegagalan yang datang.

**c) Evaluasi Proses**

Pada Evaluasi proses berfungsi untuk melakukan evaluasi pada pelaksanaan dari rencana dalam membantu staf program dan mengartikan manfaat. Evaluasi proses bisa melakukan tinjauan kembali pada rencana organisasi dan evaluasi sebelumnya agar bisa mengidentifikasi aspek-aspek penting pada berbagai organisasi yang harus dipantau. Evaluasi proses bisa memastikan bahwa proses tersebut akan berjalan dengan baik. Deviasi dari rencana awal yang sudah dijelaskan. Sehingga, nantinya juga bisa memberikan umpan balik yang bisa membantu para staf organisasi dalam menjalankan program sesuai terhadap rencana. Evaluasi proses juga bisa menjadi sumber informasi yang penting dalam menafsirkan hasil evaluasi produk.

**d) Evaluasi Hasil**

Evaluasi hasil memiliki tujuan dalam melakukan identifikasi dan evaluasi hasil serta manfaat yang sudah direncanakan dalam jangka pendek atau pun jangka panjang. Evaluasi ini juga bisa menilai keberhasilan program untuk memenuhi kebutuhan sasaran program. Penilaian keberhasilan ini bisa dikumpulkan dari individu tau kelompok yang terlibat serta dilakukan analisis. Keberhasilan atau kegagalan program ini bisa dianalisis dari berbagai perspektif. Maka, model evaluasi CIPP tidak hanya mengevaluasi

hasil namun juga aspek-aspek lain seperti konteks, input, proses, dan produk yang dihasilkan. Sehingga, penilaian yang dilakukan secara menyeluruh dan kompleks.

### 2.2.3.3 Tujuan dan Manfaat Evaluasi Program

Tujuan kegiatan evaluasi yaitu memperoleh pencapaian tujuan program menggunakan langkah untuk mengetahui keterlaksanaan kegiatan program. Dapat diketahui komponen dan sub komponen mana yang tidak terlaksana serta penyebabnya. Menurut Isbandi Rukminto dalam mengutip Feurstein menyebutkan mengapa perlu melakukan evaluasi yaitu:

- 1) Untuk melihat apa yang sudah dicapai.
- 2) Melihat kemajuan yang dikaitkan dengan tujuan program.
- 3) Agar tercapai manajemen yang lebih baik.
- 4) Mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan, untuk memperkuat program.
- 5) Melihat perbedaan yang sudah terjadi setelah diterapkan suatu program.
- 6) Melihat apakah biaya yang dikeluarkan cukup *rasionable*.
- 7) Untuk merencanakan dan mengelola kegiatan program secara lebih baik.
- 8) Melindungi pihak lain agar tidak terjebak dalam kesalahan yang sama atau mengajak pihak lain untuk melaksanakan metode yang serupa bila metode tersebut telah terbukti berhasil dengan baik.
- 9) Agar memberikan dampak yang lebih luas.

10) Memberikan kesempatan untuk mendapat masukan dari masyarakat<sup>10</sup>.

Evaluasi nantinya akan terikat pada kebijakan karena sebuah program merupakan rangkaian kegiatan seperti implementasi kebijakan. Jika sebuah program tidak dilakukan evaluasi maka tidak memungkinkan untuk bisa melihat sejauh mana praktik yang diberikan sudah direalisasikan. Nantinya informasi yang diperoleh pada kegiatan evaluasi sangat berguna juga dalam mengambil keputusan dan pengendalian kebijakan program. Berikut ini empat kemungkinan kebijakan bisa dilakukan berdasarkan hasil dalam pelaksanaan program keputusan yaitu:

- a) Menghentikan Program, karena dipandang bahwa program tersebut tidak ada manfaatnya, atau tidak dapat terlaksana sebagaimana diharapkan.
- b) Merevisi Program, karena ada bagian – bagian yang kurang sesuai dengan harapan (terdapat kesalahan tetapi hanya sedikit).
- c) Melanjutkan Program, karena pelaksanaan program menunjukkan bahwa segala sesuatu sudah berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan hasil yang bermanfaat.
- d) Menyebarkan Program, karena program tersebut berhasil dengan baik maka sangat baik jika dilaksanakan lagi ditempat dan waktu yang lain.

#### **2.2.4. Program Kartu Lansia Jakarta**

##### **2.2.4.1. Definisi Program Kartu Lansia Jakarta**

---

<sup>10</sup>Isbandi Rukminto Adi, “Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar pada pemikiran dan Pendekatan Praktis), (Jakarta: Lembaga penerbit FEI, 2003), hal. 187-188. Diakses tanggal 3 April 2023.

**Gambar 2.1 Kartu Lansia Jakarta**



Sumber: Peneliti 2023

Lansia Jakarta (KLJ) adalah program pemerintah DKI Jakarta agar terpenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat lanjut usia dan memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Program ini memberikan bantuan dana sebesar Rp 600.00.- tiap bulannya. Data-data penerima KLJ nantinya dilakukan pada Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PPFM) oleh Badan Pusat Statistik dan diverifikasi serta divalidasi oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Tujuan dari program ini yaitu untuk mencapai visi dengan mewujudkan indikator *smart living*. Tentunya ini bertujuan agar masyarakat DKI Jakarta yang sudah berusia lansia bisa memiliki hidup yang berkualitas dan bisa meningkatkan kesejahteraan mereka dengan cara meretas kemiskinan. Program ini juga didukung oleh *smart city* yang bertujuan untuk membentuk kota nyaman dan memudahkan kehidupan masyarakatnya terutama pada usia lansia.

Kebijakan Kartu Lansia Jakarta adalah kebijakan yang memberikan bantuan sosial agar tercapai Pemenuhan Kebutuhan Dasar yang tertuang dalam Peraturan Gubernur No. 193 Tahun 2017. Dapat disebut juga Bansos PKD bagian lansia adalah bantuan sosial yang diberikan pemerintah daerah yang akan didapat perorang yang telah sesuai persyaratan.

Instansi yang memiliki keterlibatan pada pembentukan program Kartu Lansia Jakarta yaitu Kementerian Sosial, Dinas Sosial, Pemerintah Daerah DKI Jakarta, Badan Pengelola Keuangan DKI, Kecamatan, Kelurahan, dan Rukun Tetangga. Sumber dana Kartu Lansia Jakarta sumbernya berasal atas APBD Peraturan Gubernur No. 142 Tahun 2018 mengenai pedoman dana hibah serta bantuan sosial yang sumbernya APBD. Program ini juga diperkuat dengan Peraturan Gubernur No. 193 Tahun 2017 mengenai Pemberian Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Lanjut Usia.

#### **2.2.4.2. Tujuan Kartu Lansia Jakarta**

Tujuan pokok program Kartu Lansia Jakarta yaitu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat lansia di DKI Jakarta yang telah termasuk tidak produktif dan termasuk pada kategori tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup hariannya. Program ini juga dapat dipakai para lansia dalam membeli obat-obatan. Program ini juga disebut penghargaan untuk menghormati dan menghargai orang tua yang sudah lansia. Sehingga, diusianya bisa tetap memperoleh perhatian yang lebih dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

### **2.2.4.3 Sasaran dan Besaran Dana**

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan kebijakan Kartu Lansia Jakarta sebagai target utamanya yaitu masyarakat yang sudah lanjut usia dengan penghasilan kecil atau tidak berpenghasilan sama sekali. Bantuan ini juga bisa digunakan bagi para lansia yang mengalami sakit lama dan hanya bisa berbaring ditempat tidur, lansia yang terlantar secara sosial, dan psikisnya. Melalui Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diberikan secara langsung kepada lansia yang terdaftar menjadi anggota Kartu Lansia Jakarta sebesar Rp. 600.000 tiap bulannya pada ATM Bank DKI.

### **2.2.4.4 Persyaratan Penerima Kartu Lansia Jakarta**

Agar bisa mendapatkan bantuan sosial pada Kartu Lansia Jakarta maka terdapat berbagai persyaratan yang harus dipenuhi seperti warga DKI Jakarta yang sudah berusia 60 tahun ke atas atau lansia, keadaan ekonomi sosial yang rendah, dan sudah terdaftar pada Basis Data Terpadu. Namun, bagi lansia yang belum terdaftar pada Basis Data Terpadu dan memenuhi syarat dengan berusia 60 tahun ke atas. Maka, bisa mendaftar melalui kelurahan setempat dan melakukan Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM). Namun, jika ada masyarakat yang belum mendapatkan manfaat tersebut, bisa menyerahkan berkas seperti fotokopi KTP dan fotokopi KK lalu diserahkan ke petugas Pusdatin Jamsos.

### **2.3. Kerangka Berfikir**

Agar penelitian ini lebih terarah, penulis membuat kerangka berfikir sebagai pedoman dalam pelaksanaan terkait evaluasi program Kartu Lansia Jakarta dalam mensejahterakan masyarakat lansia di Kota Jakarta Barat. Dalam menyusun

penelitian, penelitian berpedoman kepada pendapat para ahli mengenai teori-teori yang berkaitan dengan focus dan locus penelitian.

Kepadatan penduduk yang semakin meningkat tiap tahunnya membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan program bantuan kepada masyarakat diseluruh kalangan. Salah satunya yaitu program Kartu Lansia Jakarta yang saya akan teliti. Program ini dibuat untuk masyaraat lansia di DKI Jakarta dan program ini bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat lansia. Program ini dirancang sesuai dengan kebijakan yang sudah dijelaskan dan sudah disahkan pada tahun 2018.





## Kerangka Berfikir

